



# PERUBAHAN RENCANA KERJA

— TAHUN 2023 —

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BARRU**



BUPATI BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU  
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 39 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BUPATI BARRU,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barru Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan



- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008



- Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);



18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar



- Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
  28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);



32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
36. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);
37. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23);



38. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 16);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 1);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 5);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 6);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah



- Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 3);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 8);
  45. Peraturan Bupati Barru Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 Nomor 34).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARRU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Bupati adalah Bupati Barru.
3. Perangkat Daerah adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (Satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.



## BAB II

### KEDUDUKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

## BAB III

### SISTEMATIKA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - BAB I : PENDAHULUAN
  - BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023
  - BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
  - BAB IV : PENUTUP
- (2) Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Perubahan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. Inspektorat Daerah;
  - d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - e. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  - f. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
  - g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - h. Dinas Lingkungan Hidup;
  - i. Dinas Sosial;
  - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - k. Dinas Perikanan;
  - l. Dinas Kesehatan;
  - m. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;



- n. Dinas Perhubungan;
  - o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - p. Dinas Tenaga Kerja;
  - q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan;
  - r. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
  - s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - t. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - u. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - v. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  - w. Badan Pendapatan Daerah;
  - x. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - y. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - z. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  - aa. Kecamatan Barru;
  - bb. Kecamatan Tanete Rilau;
  - cc. Kecamatan Tanete Riaja;
  - dd. Kecamatan Pujananting;
  - ee. Kecamatan Balusu;
  - ff. Kecamatan Soppeng Riaja; dan
  - gg. Kecamatan Mallusetasi.
- (3) Isi beserta uraian Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru

Ditetapkan di Barru  
pada tanggal 21 Agustus 2023



Diundangkan di Barru  
pada tanggal 21 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2023 NOMOR





**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jln. Sultan Hasanuddin No. 82 Telp. (0427) 322285 Kode Pos 90711

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN BARRU**

Nomor : 07 / BKAD / V / 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BARRU**  
**TAHUN 2023**

KEPALA BADAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap tahun Pemerintah Daerah harus menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 dapat berjalan dengan efektif, serta berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan



Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 nomor 1);

11. Peraturan Bupati Kabupaten Barru Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Barru Nomor 27 Tentang Rencana Strategis Daerah Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023.

**KESATU :** Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Barru Tahunn 2023 adalah dokumen perencanaan 1 (Satu) tahun yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan;

**KEDUA :** Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


**KETIGA :** Menunjuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2023;

**KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Barru

Pada Tanggal : 02 Mei 2023

**KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KAB. BARRU**



**ABUBAKAR, S.Sos,M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19660816 198603 1 010

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Barru (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Barru;
3. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Barru;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barru;
5. Peringgal



Lampiran : Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru  
Nomor : 07/BKAD/V/2023  
Tanggal : 02 Mei 2023

---

**Susunan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023**

No	Jabatan	Kedudukan
1	Kepala Badan	Penanggung Jawab
2	Sekretaris	Ketua Tim
3	Bidang Perencanaan dan Anggaran	Anggota
4	Bidang Perbendaharaan	Anggota
5	Bidang Aset	Anggota
6	Bidang Akutansi	Anggota
7	Kasubag Penyusunan Program	Anggota
8	Kasubag Keuangan	Anggota
9	Kasubag Umum dan SDM	Anggota



KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KAB. BARRU

**ABU BAKAR, S.Sos,M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19660816 198603 1 010



## KATA PENGANTAR

Dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) yang berfungsi sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) ini merupakan implementasi penjabaran dari Rencana strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Evaluasi Kegiatan Tahun sebelumnya, Program dan Kegiatan serta indikator kinerja beserta kelompok sasarannya.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) diharapkan kita dapat menyusun RAPBD Perubahan yang lebih obyektif karena rencana Program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) sedapat mungkin terukur dan telah memperhitungkan ketersediaan anggaran.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini masih jauh dari sempurna namun demikian dapat di gunakan sebagai pedoman dalam menyusun anggaran dalam rangka menjalankan misi untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang ada.



Barru, 15 Agustus 2023

**ABUBAKAR, S.Sos.M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. 19660816 198603 1 010



**DAFTAR ISI**

<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3. Maksud Dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BKAD TAHUN LALU</b>	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja s/d Triwulan II Tahun 2023	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah	32
2.3. Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah	36
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDAAN PERANGKAT DAERAH</b>	38
<b>BAB IV PENUTUP</b>	52



Lampiran Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barru Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) dengan merujuk pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2023;
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan

Renja Perubahan Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Barru Tahun 2023 disusun mengacu kepada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023. Akhirnya



upaya melakukan perencanaan kinerja merupakan perwujudan kemauan yang kuat dan keras dari para pimpinan dan staf pada suatu organisasi. Pekerjaan ini membutuhkan semangat yang tinggi untuk mencapai prestasi kerja yang lebih baik, menjadikan organisasi lebih unggul karena kinerjanya baik, dan mengantisipasi ketidakpastian yang begitu besar tentang kejadian-kejadian di masa yang akan datang.

### **1.2. Landasan Hukum**

1. Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahunan adalah :
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang undang No. 28 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2023, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Bupati Barru Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023.



### 1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barru Tahun 2023 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

Sedangkan tujuan :

1. Acuan Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Barru tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Keuangan dan Aset Daerah selama tahun 2023.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 secara garis besar disusun sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Perubahan RAPBD.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

### **BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**

Pada bagian ini berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DPMPTSP berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. Di samping itu, diuraikan juga capaian pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2023 (tahun berjalan) sampai dengan Triwulan II.

#### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DPMPTSP berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

#### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Pada bagian ini berisikan mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyerenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tanyangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bagian ini berisikan tabel perubahan rencana program dan kegiatan BKAD Tahun 2023 Perubahan



#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bagian ini Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan

## BAB II

### EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barru adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barru ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barru selama tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

##### **1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;**

Program kegiatan yang dilaksanakan pada setiap SKPD dapat diukur dengan kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan, realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Badan Pengelola dan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru untuk tahun anggaran 2023 semester Pertama capaian kegiatan 35,83% dengan realisasi keuangan 35,83% atau sebesar 37.918.669.320,- (*Tiga Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Delapan Belass Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah*) dari jumlah anggaran yang dianggarkan pada APBD



Pokok Tahun 2023 sebesar 105.825.394.766,- (*Seratus Lima Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Tujuh Ratus Enam Puluh Eanam Rupiah*)

***Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;***

Untuk program kegiatan tahun anggaran 2023 semester Pertama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru terealisasi 35,83% dari 3 Program dan 13 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk Anggaran Pokok tahun 2023.

***2. Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;***

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru dalam melaksanakan program kegiatan untuk tahun Anggaran 2023 target kegiatan yang dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan dan tidak ada melebihi target dari yang direncanakan karena program kegiatan diukur berdasarkan hasil dan maksimal adalah 100%.

***3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;***

program kegiatan untuk tahun Anggaran 2023 target kegiatan yang dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan sehingga program kegiatan terpenuhi capaian kinerjanya.

***4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra perangkat daerah; dan***

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada semester Pertama tahun 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:

Belum adanya penetapan Standar Operational Procedure (SOP), dan hanya memakai SOP Internal;

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam pelaksanaan urusan Pelayanan Keuangan Daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui

kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Barru tahun 2021 – 2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barru pada tahun 2023 adalah Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi dan sosial Masyarakat, pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya melalui penajaman dan fasilitasi program yang terintegrasi lintas sektor pada semua tingkatan pemerintahan dengan dukungan kelembagaan, regulasi, data yang “up to date” dan mudah diakses dengan sumber pembiayaan yang memadai dan “pro poor”

**5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut;**

Berdasarkan strategi tersebut maka kebijakan pembangunan jangka menengah yang terkait dengan iklim investasi dan kerjasama daerah yaitu :

- Mengembangkan keadaan kondusif bagi Pelayanan Pemerintahan
  - a. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif dengan mengembangkan sistem pelayanan yang terintegrasi, mudah dan murah, regulasi pelayanan yang berorientasi pelanggan dan aparat yang profesional dengan pembiayaan dari pihak terkait

Berdasarkan strategi tersebut maka kebijakan pembangunan jangka menengah yang terkait dengan pelayanan umum diarahkan pada :

- Meningkatkan pencapaian efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif;
- Kualitas pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan;
- Meningkatkan pencapaian pelayanan publik yang prima;
- Mengembangkan sistem pelayanan yang menjamin efektifitas, efisiensi dan kepuasan pelanggan;
- Meningkatkan kemampuan manajerial dan teknis aparatur.

program kegiatan untuk tahun Anggaran 2023 target kegiatan yang dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan sehingga program



kegiatan terpenuhi capaian kinerjanya. Adapun evaluasi renja sampai dengan triwulan II tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN / KOTA RENJA PERANGKAT DAERAH  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN I + TRIWULAN II 2023**

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi (Triwulan I + Triwulan II 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 S/D Triwulan I + Triwulan II (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I + Triwulan II Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Triwulan I + April dan Mei 2023 (%)		Unit PD Penanggung jawab			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp		K	Rp	
3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 9 + 10	12 = 11/8 x 100	13 = 7 + 11	14 = 13/6 x 100	16		
		satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	021				Do kumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPK AD
5	021	201			%	100%	100%	100%	2.820.500	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPK AD
5	021	201			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	48.993.000	2 Dokumen	2.820.500	2 Dokumen	0	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	BPK AD
5	021	202			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.984.430.048		658.855.242	450.833.788	1.109.689.030	13.871.112.875	1.109.689.030	18.494.817.167			BPK AD



Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi (Triwulan I + Triwulan II 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 S/D Triwulan I + Triwulan II (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I + Triwulan II Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Triwulan I + April dan Mei 2023 (%)	Unit PD Penganggung jawab						
									I	II											
3	4	5	6		7		8		9	10	11 = 9 + 10	12 = $\frac{11}{8} \times 100$	13 = 7 + 11	14 = $\frac{13}{6} \times 100$	16						
5020102	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	37.980.643.940	100%	4.991.261.655	100%	4.984.430.048	100%	658.855.242	100%	450.833.788	100%	1.109.689.030	100%	13.871.112.875	100%	6.100.950.685	100%	101.682.511.417	BPK AD
5020105	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ASN berkinerja baik						26.400.000		0				-		-		-		-	BPK AD
5020109	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Diklat	7 Diklat	754.410.000	7 Diklat	56.337.392	7 Diklat	26.400.000	7 Diklat	-	7 Diklat	7 Diklat	-	7 Diklat	7 Diklat	56.337.392	7 Diklat	938.956.533	7 Diklat	BPK AD
5020106	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							181.133.800		38.121.666		19.540.100		57.661.766		720.772.075		57.661.766		961.029.433	
5020106	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jenis	4 Jenis	19.225.000	4 Jenis	3.840.000	4 Jenis	3.841.800	4 Jenis	-	4 Jenis	4 Jenis	-	4 Jenis	4 Jenis	3.840.000	4 Jenis	64.000.000	4 Jenis	BPK AD

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi (Triwulan I + Triwulan II 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 S/D Triwulan I + Triwulan II (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I + Triwulan II Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Triwulan I + April dan Mei 2023 (%)	Unit PD Penganggung jawab										
						I	II															
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 + 10	12 = 11/8 x 100	13 = 7 + 11	14 = 13/6 x 100	16										
		Banguna n Kantor yang Disediaka n																				
502010209	Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12 Bulan	1.268.839.653	12 Bulan	131.058.758	12 Bulan	177.292.000	12 Bulan	38.121.666	12 Bulan	19.540.100	12 Bulan	57.661.766	12 Bulan	720.772.075	12 Bulan	188.720.524	12 Bulan	3.145.342.067	BPK AD
502010207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				31.000.000			0														BPK AD
502010207	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banguna n Lainnya yang Disediaka	Jenis	4 Jenis	825.000.000	4 Jenis	304.538.200	4 Jenis	31.000.000	4 Jenis	-	4 Jenis	-	4 Jenis	-	4 Jenis	-	4 Jenis	304.538.200	4 Jenis	5.075.636.667	BPK AD



Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi (Triwulan I + Triwulan II 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 S/D Triwulan I + Triwulan II (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I + Triwulan II Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Triwulan I + April dan Mei 2023 (%)	Unit PD Penganggung jawab										
						I	II															
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 + 10	12 = $\frac{11}{8} \times 100$	13 = 7 + 11	14 = $\frac{13}{6} \times 100$	16										
5 0 2 0 1 0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				310.989.200	37.500.000	7.873.500	45.373.500	567.168.750	45.373.500	756.225.000	BPK AD										
5 0 2 0 1 0 8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan n Jasa Surat Menyurat	Jenis	4 Jenis	1.748.957.884	4 Jenis	253.754.300	4 Jenis	306.189.200	4 Jenis	37.500.000	4 Jenis	7.873.500	4 Jenis	45.373.500	4 Jenis	567.168.750	4 Jenis	299.127.800	4 Jenis	4.985.463.333	BPK AD
5 0 2 0 1 0 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	OB	2 OB	48.000.000	2 OB	4.800.000	2 OB	4.800.000	2 OB	-	2 OB	-	2 OB	-	2 OB	4.800.000	2 OB	4.800.000	2 OB	80.000.000	BPK AD
5 0 2 0 1 0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				64.485.000	-	20.902.000	20.902.000	261.275.000	20.902.000	348.366.667	BPK AD										

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi (Triwulan I + Triwulan II 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 S/D Triwulan I + Triwulan II (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I + Triwulan II Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Triwulan I + April dan Mei 2023 (%)	Unit PD Penganggung jawab					
									I	II										
3	4	5	6		7		8		9	10	11 = 9 + 10	12 = 11/8 x 100	13 = 7 + 11	14 = 13/6 x 100	16					
502010201	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Jabatan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4 Unit	200.000.000	4 Unit	29.098.182	4 Unit	9.500.000	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	29.098.182	484.969.700	BPK AD			
502010202	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10 Unit	47.500.000	10 Unit	5.236.739	10 Unit	40.000.000	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	17.320.000	216.500.000	22.556.739	375.945.650	BPK AD	
5020109	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	Unit	1 Unit	168.000.000	1 Unit	33.675.000	1 Unit	14.985.000	1 Unit	0	1 Unit	1 Unit	1 Unit	3.582.000	3.582.000	44.775.000	37.257.000	620.950.000	

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra PD sampai Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi (Triwulan I + Triwulan II 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 S/D Triwulan I + Triwulan II (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I + Triwulan II Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Triwulan I + April dan Mei 2023 (%)	Unit PD Penganggung jawab	
									I	II						
3	4	5	6		7		8		9	10	11 = 9 + 10	12 = 11/8 x 100	13 = 7 + 11	14 = 13/6 x 100	16	
	Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi														
50202	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>							99.606.489.243	21.809.653.324	4.807.977.216	26.617.630.540	332.720.381.750	26.617.630.540	443.627.175.667	BPK AD	
5020201	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>							891.828.000	34.732.216	22.112.700	56.844.916	710.561.450	56.844.916	947.415.267	BPK AD	
5020201	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2 Dokumen	191.094.293	2 Dokumen		2 Dokumen	33.219.000	2 Dokumen	1.200.000	2 Dokumen	1.200.000	2 Dokumen	20.000.000	BPK AD
5020201	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2 Dokumen	146.492.963	2 Dokumen		2 Dokumen	26.130.000	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	BPK AD



Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi (Triwulan I + Triwulan II 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 S/D Triwulan I + Triwulan II (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I + Triwulan II Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Triwulan I + April dan Mei 2023 (%)	Unit PD Penganggung jawab
									I	II					
3	4	5	6		7		8		9	10	11 = 9 + 10	12 = 11/8 x 100	13 = 7 + 11	14 = 13/6 x 100	16
5020203	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi Dokumen	2	38.16	2		2	6.847.000	2	-	2	-	2	-	BPK AD
50204	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi SKPD	34	29.97	34		34	7.497.000	34	0	34	-	34	-	BPK AD
50205	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi SKPD	34	83.02	34		34	5.883.000	34	-	34	-	34	-	BPK AD
50206	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi SKPD	34	83.02	34		34	7.297.500	34	-	34	4.526.000	34	4.526.000	BPK AD
50207	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Dokumen	2	3.517.843.074	2	367.925.650	2	323.391.000	2	5.106.750	2	5.106.750	2	5.106.750	BPK AD

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi (Triwulan I + Triwulan II 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 S/D Triwulan I + Triwulan II (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I + Triwulan II Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Triwulan I + April dan Mei 2023 (%)	Unit PD Penganggung jawab
						I	II					
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 + 10	12 = $\frac{11}{8} \times 100$	13 = 7 + 11	14 = $\frac{13}{6} \times 100$	16
	Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Daerah tentang Penjabaran APBD										
502020108	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1.906.619.300	174.683.800	258.386.000	4.300.600	2.475.000	6.775.600	84.695.000	181.459.400	3.024.323.333	BPK AD
502020109	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3.700.000.000		200.185.500	22.839.866	12.811.700	35.651.566	445.644.575	35.651.566	594.192.767	BPK AD
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				11.497.500	0	700.000	700.000	8.750.000	700.000	11.666.667	
	Koordinasi Perencanaan				11.494.	2.485.	400.0	2.885.	36.062.	2.885.	48.083.	

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi (Triwulan I + Triwulan II 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 S/D Triwulan I + Triwulan II (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I + Triwulan II Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Triwulan I + April dan Mei 2023 (%)	Unit PD Penganggung jawab						
						I	II											
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 + 10	12 = $\frac{11}{8} \times 100$	13 = 7 + 11	14 = $\frac{13}{6} \times 100$	16						
	Anggaran Belanja Daerah				500		000	00	000	500	000	333						
5 0 2 0 2 2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				348.925.500		13.164.500	24.252.256	37.416.756	467.709.450	37.416.756	623.612.600	BPK AD					
5 0 2 0 2 0 1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	SK PD	34 SK PD	1.641.136.500	34 SK PD	34 SK PD	260.691.000	34 SK PD	-	34 SK PD	22.757.000	34 SKPD	22.757.000	34 SKPD	379.283.333	BPK AD	
5 0 2 0 2 0 5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana	Kegiatan	2 Kegiatan	211.484.069	2 Kegiatan	2 Kegiatan	47.092.000	2 Kegiatan	5.790.500	2 Kegiatan	5.790.500	2 Kegiatan	2 Kegiatan	5.790.500	2 Kegiatan	96.508.333	BPK AD



Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi (Triwulan I + Triwulan II 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 S/D Triwulan I + Triwulan II (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I + Triwulan II Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Triwulan I + April dan Mei 2023 (%)	Unit PD Penganggung jawab	
									I	II						
3	4	5	6		7		8		9	10	11 = 9 + 10	12 = $\frac{11}{8} \times 100$	13 = 7 + 11	14 = $\frac{13}{6} \times 100$	16	
		Transfer Lainnya														
5	02206	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	210.400.000	2	2	10.742.000	2	-	2	2	2	2	-	2	BPK AD

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi (Triwulan I + Triwulan II 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 S/D Triwulan I + Triwulan II (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I + Triwulan II Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Triwulan I + April dan Mei 2023 (%)	Unit PD Penganggung jawab				
							I	II	9	10						11 = 9 + 10	12 = 11/8 x 100	13 = 7 + 11	14 = 13/6 x 100
3	4	5	6		7		8		9	10	11 = 9 + 10	12 = 11/8 x 100	13 = 7 + 11	14 = 13/6 x 100	16				
5 0 2 0 2 0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran	3 Lap ora n	169.5 00.00 0	3 Lap ora n	30.400. 000	3 Lap ora n	7.374. 000	3 Lap ora n	1.535. 250	3 Lap ora n	8.909. 250	3 Lap ora n	111.36 5.625	3 Lap ora n	8.909. 250	3 Lap ora n	148.48 7.500	BPK AD

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi (Triwulan I + Triwulan II 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 S/D Triwulan I + Triwulan II (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I + Triwulan II Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Triwulan I + April dan Mei 2023 (%)	Unit PD Penganggung jawab	
									I	II						
3	4	5	6		7		8		9	10	11 = 9 + 10	12 = $\frac{11}{8} \times 100$	13 = 7 + 11	14 = $\frac{13}{6} \times 100$	16	
		an Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyediaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
5	020203	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>			39.748.000	487.002.100	99.203.758		39.910.000		<b>139.113.758</b>	<b>1.738.921.975</b>	<b>178.861.758</b>	<b>2.981.029.300</b>	BPK AD	
5	020302	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Kewajiban,	4 Dokumen	179.998.528	4 Dokumen	4 Dokumen	28.177.000	4 Dokumen	0	-	4 Dokumen	-	4 Dokumen	-	BPK AD



Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi (Triwulan I + Triwulan II 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 S/D Triwulan I + Triwulan II (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I + Triwulan II Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Triwulan I + April dan Mei 2023 (%)	Unit PD Penganggung jawab					
						I	II										
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 + 10	12 = 11/8 x 100	13 = 7 + 11	14 = 13/6 x 100	16					
	LO dan Beban	Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban															
50203	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	2 Laporan	207.173.481	2 Laporan	33.284.300	2 Laporan	0	150.000	2 Laporan	1.875.000	2 Laporan	150.000	2 Laporan	2.500.000	BPK AD
50203	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/K	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten	Dokumen	2 Dokumen	2.856.961.252	2 Dokumen	354.024.300	2 Dokumen	99.203.758	39.760.000	2 Dokumen	1.737.046.975	2 Dokumen	138.963.758	2 Dokumen	2.316.062.633	BPK AD

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi (Triwulan I + Triwulan II 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 S/D Triwulan I + Triwulan II (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I + Triwulan II Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Triwulan I + April dan Mei 2023 (%)	Unit PD Penganggung jawab
									I	II					
3	4	5	6		7		8		9	10	11 = 9 + 10	12 = 11/8 x 100	13 = 7 + 11	14 = 13/6 x 100	16
	ota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	n/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota													
502030	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2	1	2	164.808.866	2	2	71.516.500	2	-	2	-	2	BPK AD
50204	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>							97.671.509.643	22.580.505.850	4.715.295.844	27.295.801.694	341.197.521.175	27.295.801.694	454.930.028.233	BPK AD

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi (Triwulan I + Triwulan II 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 S/D Triwulan I + Triwulan II (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I + Triwulan II Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Triwulan I + April dan Mei 2023 (%)	Unit PD Penganggung jawab		
						I	II							
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 + 10	12 = 11/8 x 100	13 = 7 + 11	14 = 13/6 x 100	16		
5020204	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	12.765.192.144	1.558.257.404,18	1.530.000.000	1	1.075.725.389	1.075.725.389	13.446.567.363	2.633.982.793	43.899.713.220	BPK AD		
5020408	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	383.816.304.000	105.624.851.123	91.788.792.151	1	21.662.552.850	3.639.570.455	316.276.541.313	130.926.974.428	2.182.116.240.467	BPK AD		
5020409	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		97.165.585.148	11.719.512.665	4.352.717.492	1	917.953.000	917.953.000	11.474.412.500	12.637.465.665	210.624.427.750	BPK AD		
50205	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem</b>				<b>207.224.000</b>		-	6.366.422		<b>6.366.422</b>	<b>79.580.275</b>	<b>6.366.422</b>	<b>106.107.033</b>	<b>BPK AD</b>



Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi (Triwulan I + Triwulan II 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 S/D Triwulan I + Triwulan II (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I + Triwulan II Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Triwulan I + April dan Mei 2023 (%)	Unit PD Penganggung jawab
						I	II					
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 + 10	12 = 11/8 x 100	13 = 7 + 11	14 = 13/6 x 100	16
	<b>Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>											
5020501	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah Dokumen	292.358.514	60 Dokumen	60 Dokumen 56.221.000	60 Dokumen	-	60 Dokumen 5.566.422	60 Dokumen 5.566.422	60 Dokumen 69.580.275	60 Dokumen 5.566.422	60 Dokumen 92.773.700
5020502	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Dokumen	592.226.460	1 Dokumen	1 Dokumen 62.936.275	1 Dokumen 87.418.500	-	1 Dokumen	1 Dokumen -	1 Dokumen -	1 Dokumen 62.936.275	1 Dokumen 1.048.937.917



Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi (Triwulan I + Triwulan II 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 S/D Triwulan I + Triwulan II (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I + Triwulan II Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Triwulan I + April dan Mei 2023 (%)	Unit PD Penganggung jawab											
						I	II																
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 + 10	12 = 11/8 x 100	13 = 7 + 11	14 = 13/6 x 100	16											
5 0 2 3 0 1 4	Barang Milik Daerah	n Barang Milik Daerah	men	men	men	men	men	men	men	men	men	men											
5 0 2 3 0 1 4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Do ku me n	2 Do ku me n	102.0 74.50 4	2 Do ku me n	15.270. 000	2 Do ku me n	-	2 Do ku me n	2 Dok ume n	-	2 Dok ume n	-	2 Dok ume n	-	2 Dok ume n						
5 0 2 3 0 1 5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	6 Lap ora n	6 Lap ora n	1.773. 647.3 70	6 Lap ora n	249.43 8.250	6 Lap ora n	184.61 0.100	6 Lap ora n	48.262 .548	6 Lap ora n	37.61 8.300	6 Lap ora n	85.880 .848	6 Lap ora n	1.073.5 10.600	6 Lap ora n	335.31 9.098	6 Lap ora n	5.588.6 51.633	6 Lap ora n	
5 0 2 3 0 1 6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	7 Lap ora n	7 Lap ora n	372.6 69.77 7	7 Lap ora n	37.864 .680	7 Lap ora n	63.738. 000	7 Lap ora n	-	7 Lap ora n	7 Lap ora n	7 Lap ora n	-	7 Lap ora n	-	7 Lap ora n	37.864 .680	7 Lap ora n	631.07 8.000	7 Lap ora n	
5 0 2 3 0 1 7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Lap ora n	1 Lap ora n	584.9 12.43 0	1 Lap ora n	101.09 1.375	1 Lap ora n	101.09 1.375	1 Lap ora n	-	1 Lap ora n	1 Lap ora n	1 Lap ora n	-	1 Lap ora n	-	1 Lap ora n	-	1 Lap ora n	-	1 Lap ora n	-



Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi (Triwulan I + Triwulan II 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 S/D Triwulan I + Triwulan II (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I + Triwulan II Tahun 2023 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Triwulan I + April dan Mei 2023 (%)	Unit PD Penganggung jawab	
									I	II							
3	4	5	6		7		8		9	10	11 = 9 + 10	12 = $\frac{11}{8} \times 100$	13 = 7 + 11		14 = $\frac{13}{6} \times 100$	16	
502032010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5	523.264.628	5	5	5	99.413.000	5	300.000	5	300.000	5	300.000	5	5.000.000	
	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Lapran Barang Milik Daerah						17.863.500		-								
502032013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik	64	1.133.332.584	64	64	64	88.268.500	64	-	64	-	64	64.485.800	64	1.074.763.333	

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi (Triwulan I + Triwulan II 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 S/D Triwulan I + Triwulan II (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I + Triwulan II Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Triwulan I + April dan Mei 2023 (%)	Unit PD Penganggung jawab
						I	II					
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 + 10	12 = $\frac{11}{8} \times 100$	13 = 7 + 11	14 = $\frac{13}{6} \times 100$	16
		Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota										
					106.637.692.274	21.754.073.404	4.761.622.344	26.515.695.748				

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

- a. Menyiapkan bahan petunjuk teknis penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Menyiapkan rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Menyiapkan Surat penyediaan Dana (SPD) dan registernya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Melakukan pencatatan register Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- e. Melakukan pengelolaan Belanja Pegawai;
- f. Menyediakan data alokasi kebutuhan gaji PNS dan menghimpun laporan pelaksanaannya;
- g. Melakukan pemeriksaan dan meneliti surat permintaan pembayaran gaji, pensiun serta tunjangan lainnya;
- h. Menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan belanja pegawai;
- i. Menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji untuk pensiun, meninggal dunia serta mutasi;
- j. Mengkoordinasikan dan mengajukan kekurangan gaji, kenaikan tingkat, pangkat, berkala, uang duka wafat, serta usulan gaji yang diajukan oleh masing-masing Perangkat Daerah;
- k. Menyajikan cetak data gaji Perangkat Daerah;
- l. Menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Dana Perimbangan;
- m. Menguji kebenaran berkas pengajuan Surat Permintaan Pembayaran
- n. SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) atas Keputusan Otorisasi;
- o. Mempersiapkan bahan pertimbangan pelaksanaan penyelesaian masalah perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

Untuk mengevaluasi Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru dengan mengukur capaian kinerja dengan menggunakan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah yaitu:

1. Meningkatnya kualitas penerapan/implementasi SAKIP BKAD.
2. Meningkatnya Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel dan Pelayanan Publik yang Baik.



Sasaran strategis diatas diukur dengan mengukur nilai SAKIP BKAD berdasarkan LHE Inspektorat dan WTP yang diberikan oleh BPK dan Opini BPK merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan didasarkan pada 4 kriteria yang terdiri dari:

1. Kesesuaian dengan standard Akuntansi Pemerintahan
2. Kecukupan Pengungkapan
3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
4. Efektifitas Sistem Pengendalian Internal

Persentase Penyajian Laporan Keuangan yang sesuai standard Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan formula Jumlah Laporan Keuangan yang sudah direkon banding dengan jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yaitu Laporan Keuangan yang sesuai ketentuan dapat mempercepat penyusunan Raperda APBD dengan tepat waktu.

Persentase PD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan dengan formula jumlah laporan keuangan yang tepat waktu banding dengan jumlah laporan keuangan PD. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dari kompilasi laporan Keuangan PD yang telah terintegrasi dalam system informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2019 telah selesai dan sedang diaudit BPK RI dengan harapan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dapat dipertahankan.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.07/2015 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Tunai, Bidang Akuntansi dan Pelaporan telah memenuhi permintaan berupa data Laporan Realisasi APBD bulanan yang nantinya tiap bulan harus diupload di website resmi Kementerian Keuangan bersamaan dengan data Perkiraan Belanja Operasi dan Belanja Modal Bulanan dari Bidang Anggaran dan Data Posisi Kas Bulanan dari Bidang Perbendaharaan. Diperlukan dukungan data entry pendapatan dari Perangkat Daerah penghasil dalam memenuhi PMK 235/PMK.07/2015, sehingga untuk realisasi pendapatan diperlukan waktu yang sedikit lebih lama dibanding data entry realisasi belanja yang secara otomatis bisa terkoneksi dari Bidang Perbendaharaan.

Dalam Pelaksanaan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI dalam Penyusunan, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barru masih kurangnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten dan handal dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Barru. Uraian di atas dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini:



### 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Perkembangan masyarakat dewasa ini telah membawa pemerintah pada posisi sentral, dalam arti peran pemerintah semakin diharapkan untuk melaksanakan berbagai hal untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Di sisi lain birokrasi sebagai unsur terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan belum mampu untuk mengatasi Berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, hal ini diakibatkan persoalan internal birokrasi itu sendiri yang belum dapat teratasi dengan baik dan menjadi isu-isu strategis yang berkembang di tengah masyarakat antara lain :

- a. Ketidaksiplinan aparatur pemerintah dalam berbagai hal, termasuk dalam pemberian pelayanan dan mentaati ketentuan jam kerja.
- b. Sistem Kelembagaan dan Ketatalaksanaan pemerintah yang belum optimal.
- c. Rendahnya efisiensi dan efektifitas kinerja aparatur pemerintah.
- d. Rendahnya kualitas pelayanan umum.
- e. Rendahnya tingkat kesejahteraan PNS
- f. Sarana dan prasarana kerja aparatur belum memadai.

#### ***i. Tugas Pokok dan Fungsi***

1. Inovasi-inovasi dibidang pelayanan dan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat.
2. Penyerdehanaan prosedur dan peningkatan mutu dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dengan melibatkan Kinerja-Lembaga-lembaga yang berkaitan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program dan kegiatan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi.



**ii. Sumber Daya Manusia Aparatur**

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

**iii. Sarana dan Prasarana**

1. Mengembangkan Teknologi dalam hal Pengelolaan Keuangan Daerah serta perangkat dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan Keuangan Daerah menunjang pelayanan dan pembangunan.
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
4. Optimasi, penambahan dan perubahan ruang
5. dan untuk memenuhi standard kelayakan kerja berdasarkan perka BKPM No 06 Tahun 2011.

**BAB III****RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program dan kegiatan pada dokumen Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset daerah Tahun 2023 terdiri dari 3 (Tiga) program, 13 kegiatan dan 46 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 106.637.692.274,- sebelum perubahan menjadi Rp. 107.783.246.066,- . Adapun Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA**

Dengan kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan
    1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan
    1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan
    1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan
    1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    2. Belanja peralatan rumah tangga
    3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Sub Kegiatan
    1. Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan
    1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
    3. Pemeliharaan dan Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

## 2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dengan Kegiatan:

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
  - Sub Kegiatan
    1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
    2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
    3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
    4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
    5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DKA-SKPD
    6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DKA-SKPD
    7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
    8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD
    9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran
    10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
    11. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
  - Sub Kegiatan
    1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

2. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
  3. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
  4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- Sub Kegiatan
    1. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan-LO dan Beban
    2. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulan dan Semesteran
    3. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
    4. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Sub Kegiatan
    1. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
    2. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
    3. Pengelolaan Dana Darurat Mendesak

### 3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Dengan Kegiatan

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - Sub Kegiatan
    1. Penyusunan Standar Harga
    2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah



3. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Penatausahaan Barang Milik Daerah
5. Inventarisasi Barang Milik Daerah
6. Pengamanan Barang Milik Daerah
7. Optimalisasi Penggunaan Pemamfaatan, Pemindahtanganan Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
8. Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah
9. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Uraian jumlah program, kegiatan, sub kegiatan, pagu indikatif sebelum dan sesudah perubahan dapat di lihat pada tabel 3.1 Berikut :

**Tabel 3.1**  
**INDIKASI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**  
**RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023				Pagu Indikatif			PERANGKAT DAERAH				
					Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif							
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan					
5					<b>URUSAN PENUNJANG</b>											
5	2				<b>KEUANGAN</b>											
5	021				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP BKAD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP BKAD			Level 3	Level 3	5.601.258.548	5.906.453.548	305.195.000	BKAD
5	021	20.1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan, penggaran dan pelaporan hasil evaluasi kinerja BPKAD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan, penggaran dan pelaporan hasil evaluasi kinerja BPKAD			100%	100%	2.820.500	2.820.500	0	BKAD
5	021	20.1	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan BPKAD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan BPKAD	BKAD	BKAD	12 Bln	12 Bln	2.820.500	2.820.500	0	BKAD
5	021	20.2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan dokumen keuangan BPKAD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan dokumen keuangan BPKAD			100%	100%	4.984.430.048	4.984.430.048	0	BKAD
5	021	20.2	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	BKAD	BKAD	12 Bln	12 Bln	4.984.430.048	4.984.430.048	0	BKAD
5	021	20.5			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Telah Mengikuti Diklat Kompetensi Terhadap Keseluruhan ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Telah Mengikuti Diklat Kompetensi Terhadap Keseluruhan ASN			100%	100%	26.400.000	26.400.000	0	BKAD

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023				Pagu Indikatif			PERANG KAT DAERAH
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
5	0	0	20.	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	BKAD	BKAD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	26.400.000	26.400.000	0	BKAD
5	0	0	20.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	100%	181.133.800	308.343.800	127.210.000	BKAD
5	0	0	20.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	BKAD	BKAD	4 Jenis	4 Jenis	3.841.800	3.841.800	0	BKAD
5	0	0	20.	0	Belanja Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	Belanja Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	BKAD	BKAD	4 Jenis	4 Jenis		5.000.000	5.000.000	BKAD
5	0	0	20.	0	Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	BKAD	BKAD			177.292.000	299.502.000	122.210.000	BKAD
5	0	0	20.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	100%	31.000.000	153.785.000	122.785.000	BKAD
5	0	0	20.	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKAD	BKAD	12 Bln	12 Bln	31.000.000	153.785.000	122.785.000	BKAD
5	0	0	20.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keterpenuhan Layanan Jasa Penunjang Urusan Kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keterpenuhan Layanan Jasa Penunjang Urusan Kantor			100%	100%	310.989.200	306.189.200	-4.800.000	BKAD
5	0	0	20.	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis jasa surat menyurat yang disediakan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis jasa surat menyurat yang disediakan	BKAD	BKAD	12 Jenis	12 Jenis	306.189.200	306.189.200	0	BKAD

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023				Pagu Indikatif			PERANG KAT DAERAH
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
5	0	0	20.	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jenis Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jenis Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	BKAD	BKAD	1 OB	1 OB	4.800.000	-	-4.800.000	BKAD
5	0	0	20.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara			100%	100%	64.485.000	124.485.000	60.000.000	BKAD
5	0	0	20.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara	BKAD	BKAD	4 Unit	4 Unit	9.500.000	9.500.000	0	BKAD
5	0	0	20.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional yang dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional yang dipelihara	BKAD	BKAD	4 Unit	4 Unit	40.000.000	40.000.000	0	BKAD
5	0	0	20.	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Sarana dan Prasarana Gedung kantor yang dipelihara	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Sarana dan Prasarana Gedung kantor yang dipelihara	BKAD	BKAD	1 Gedung	1 Gedung	14.985.000	74.985.000	60.000.000	BKAD
5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penetapan perda APBD Tepat Waktu Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penetapan perda APBD Tepat Waktu Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan			100%	100%	100.418.786.751	101.055.538.543	636.751.792	BKAD



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023				Pagu Indikatif			PERANG KAT DAERAH				
					Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif							
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan					
		Persentase Realisasi Pengeluaran Kas Daerah Terhadap Realisasi Penerimaan Kas Daerah		Persentase Realisasi Pengeluaran Kas Daerah Terhadap Realisasi Penerimaan Kas Daerah							0	BKAD				
		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Ke BPK RI Tepat Waktu		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Ke BPK RI Tepat Waktu							0	BKAD				
5	0 2	0 2	2.0 1		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase keterpenuhan Dokumen Anggaran Daerah yang disahkan Tepat Waktu	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase keterpenuhan Dokumen Anggaran Daerah yang disahkan Tepat Waktu			100%	100%	891.828.000	971.073.300	79.245.300	BKAD
5	0 2	0 2	2.0 1	0 1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disepakati tepat waktu	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disepakati tepat waktu	BKAD	BKAD	1 Dok.	1 Dok.	33.219.000	33.219.000	0	BKAD
5	0 2	0 2	2.0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA Perubahan dan PPAS Perubahan yang disepakati tepat waktu	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA Perubahan dan PPAS Perubahan yang disepakati tepat waktu	BKAD	BKAD	1 Dok.	1 Dok.	26.130.000	26.130.000	0	BKAD
5	0 2	0 2	2.0 1	0 3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang telah diverifikasi dan disetujui	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang telah diverifikasi dan disetujui	BKAD	BKAD	1 Dok.	1 Dok.	6.847.000	6.847.000	0	BKAD
5	0 2	0 2	2.0 1	0 4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang telah diverifikasi dan disetujui	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang telah diverifikasi dan disetujui	BKAD	BKAD	1 Dok.	1 Dok.	7.497.000	7.497.000	0	BKAD
5	0 2	0 2	2.0 1	0 5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang telah diverifikasi dan disetujui	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang telah diverifikasi dan disetujui	BKAD	BKAD	1 Dok.	1 Dok.	5.883.000	6.713.300	830.300	BKAD

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023				Pagu Indikatif			PERANG KAT DAERAH
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
5	0	0	2.0	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang telah diverifikasi dan disetujui	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang telah diverifikasi dan disetujui	BKAD	BKAD	1 Dok.	1 Dok.	7.297.500	8.231.500	934.000	BKAD
5	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda dan Perkada APBD yang ditetapkan tepat waktu	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda dan Perkada APBD yang ditetapkan tepat waktu	BKAD	BKAD	1 Dok.	1 Dok.	323.391.000	339.180.000	15.789.000	BKAD
5	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda dan Perkada APBD Perubahan yang ditetapkan tepat waktu	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda dan Perkada APBD Perubahan yang ditetapkan tepat waktu	BKAD	BKAD	1 Dok.	1 Dok.	258.386.000	264.986.000	6.600.000	BKAD
5	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi tentang kebijakan Anggaran yang tersusun dan ditetapkan	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi tentang kebijakan Anggaran yang tersusun dan ditetapkan	BKAD	BKAD	1 Dok.	1 Dok.	200.185.500	250.327.500	50.142.000	BKAD
5	0	0	2.0	1	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		BKAD	BKAD			11.497.500	13.972.500	2.475.000	BKAD
5	0	0	2.0	1	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		BKAD	BKAD			11.494.500	13.969.500	2.475.000	BKAD
5	0	0	2.0		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rata - rata Waktu Penerbitan Dokumen Administrasi Pengeluaran Kas	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rata - rata Waktu Penerbitan Dokumen Administrasi Pengeluaran Kas			15 menit	15 Menit	348.925.500	443.729.500	94.804.000	BKAD

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023				Pagu Indikatif			PERANG KAT DAERAH
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
5	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Yang Diterbitkan	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Yang Diterbitkan	BKAD	BKAD	1 Keg	1 Keg	260.691.000	333.825.000	73.134.000	BKAD
5	0	0	2.0	0	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BKAD	BKAD	1 Keg	1 Keg	47.092.000	49.732.000	2.640.000	BKAD
5	0	0	2.0	0	Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Mou Tansaksi Non Tunai	Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Mou Tansaksi Non Tunai	BKAD	BKAD	1 Keg	1 Keg	10.742.000	17.242.000	6.500.000	BKAD
5	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemot ongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Pengelolaan Kas Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemot ongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Pengelolaan Kas Daerah	BKAD	BKAD	1 Keg	1 Keg	30.400.500	42.930.500	12.530.000	BKAD
5	0	0	2.0		Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase keterpenuhan pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase keterpenuhan pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			100%	100%	487.002.100	562.002.100	75.000.000	BKAD

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023				Pagu Indikatif			PERANG KAT DAERAH
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
5	0	0	2.0	0	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Laporan LO	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Laporan LO	BKAD	BKAD	1 Keg	1 Keg	28.177.000	28.177.000	0	BKAD
5	0	0	2.0	0	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran	Jumlah LRA yang disusun	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran	Jumlah LRA yang disusun	BKAD	BKAD	1 Keg	1 Keg	33.284.300	33.284.300	0	BKAD
5	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang disusun dan diselesaikan tepat waktu	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang disusun dan diselesaikan tepat waktu	BKAD	BKAD	1 Keg	1 Keg	354.024.300	429.024.300	75.000.000	BKAD
5	0	0	2.0	1	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Sistem dan Prosedur akutansi dan pelaporan keuangan	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Sistem dan Prosedur akutansi dan pelaporan keuangan	BKAD	BKAD	1 Keg	1 Keg	71.516.500	71.516.500	0	BKAD



KODE					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023				Pagu Indikatif			PERANGKAT DAERAH
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
5	0	0	2.0		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Urusan Kewenangan Pengelolaan Daerah yang Dilaksanakan	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Urusan Kewenangan Pengelolaan Daerah yang Dilaksanakan			100%	100%	98.483.807.151	98.871.509.643	387.702.492	BKAD
5	0	0	2.0	0	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran cicilan Pokok Bunga dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penerimaan Pinjaman Daerah	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran cicilan Pokok Bunga dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penerimaan Pinjaman Daerah	BKAD	BKAD	1 Keg	1 Keg	1.530.000.000	2.730.000.000	1.200.000.000	BKAD
5	0	0	2.0	0	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Validasi Administrasi/Dokumen Penerima Bantuan Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Validasi Administrasi/Dokumen Penerima Bantuan Keuangan	BKAD	BKAD	1 Keg	1 Keg	91.788.792.151	91.788.792.151	0	BKAD
5	0	0	2.0	0	Pengelolaan Dana Darurat Mendesak	Jumlah Validasi Administrasi/Dokumen SKPD Penerima BTT	Pengelolaan Dana Darurat Mendesak	Jumlah Validasi Administrasi/Dokumen SKPD Penerima BTT	BKAD	BKAD	1 Keg	1 Keg	5.165.015.000	4.352.717.492	812.297.508	BKAD
5	0	0	2.0		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jenis pemeliharaan dan pengembangan SIPD	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jenis pemeliharaan dan pengembangan SIPD			1 jenis	1 Jenis	207.224.000	207.224.000	0	BKAD
5	0	0	2.0	0	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan analisis data keuangan	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan analisis data keuangan	BKAD	BKAD	1 Keg.	1 Keg.	56.221.000	56.221.000	0	BKAD
5	0	0	2.0	0	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jenis Pelaksanaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jenis Pelaksanaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	BKAD	BKAD	1 Keg.	1 Keg.	87.418.500	87.418.500	0	BKAD

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023				Pagu Indikatif			PERANG KAT DAERAH
									Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
5	0	0	2.0	0	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jenis Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jenis Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	BKAD	BKAD	1 Keg.	1 Keg.	63.584.500	63.584.500	0	BKAD
5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pembedayaan aset tetap tanah dan bangunan	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pembedayaan aset tetap tanah dan bangunan			100%	100%	617.646.975	821.253.975	203.607.000	BKAD
5	0	0	2.0		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jenis Barang Milik Daerah yang dikelola	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jenis Barang Milik Daerah yang dikelola			6 Jenis	6 Jenis	617.646.975	821.253.975	203.607.000	BKAD
5	0	0	2.0	0	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga Yang ditetapkan	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga Yang ditetapkan	BKAD	BKAD	1 Keg.	1 Keg.	43.851.500	43.851.500	0	BKAD
5	0	0	2.0	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	BKAD	BKAD	1 Keg.	1 Keg.	3.541.000	3.541.000	0	BKAD
5	0	0	2.0	0	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah regulasi pengelolaan aset BMD yang tersusun dan tersosialisas	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah regulasi pengelolaan aset BMD yang tersusun dan tersosialisas	BKAD	BKAD	1 Keg.	1 Keg.	15.270.000	15.270.000	0	BKAD
5	0	0	2.0	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan pengelolaan data aset daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan pengelolaan data aset daerah	BKAD	BKAD	1 Keg.	1 Keg.	184.610.100	244.329.100	59.719.000	BKAD
5	0	0	2.0	0	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan data aset yang ter-update dan terinci	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan data aset yang ter-update dan terinci	BKAD	BKAD	1 Keg.	1 Keg.	63.738.000	63.738.000	0	BKAD
5	0	0	2.0	0	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah aset bersertifikat dan ber BPKB	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah aset bersertifikat dan ber BPKB	BKAD	BKAD	1 Keg.	1 Keg.	101.091.375	235.091.375	134.000.000	BKAD

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan)	Tahun Rencana 2023				Pagu Indikatif			PERANG KAT DAERAH
					Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	
5 0 0 2.0 1 0	Optimalisasi Penggunaan, Pemamfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jenis dokumen atas hasil optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemamfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jenis dokumen atas hasil optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD	BKAD	1 Keg.	1 Keg.	99.413.000	99.413.000	0	BKAD
5 0 0 2.0 1 1	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BKAD	BKAD	4 Laporan	4 Laporan	17.863.500	13.903.500	-3.960.000	BKAD
5 0 0 2.0 1 3	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah pengelola Barang Milik Daerah yang dibina	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah pengelola Barang Milik Daerah yang dibina	BKAD	BKAD	1 Keg.	1 Keg.	88.268.500	102.116.500	13.848.000	BKAD
<b>TOTAL</b>									106.637.692. 274	107.783.246.06 6	1.145.553. 792	

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **1.1 Catatan Penting**

Program dan Kegiatan Renja Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru sesuai dengan RPJMD Kabupaten. Proyeksi Budget terhadap program kegiatan tersebut berdasarkan historical Kegiatan sebelumnya dan mengacu kepada Analisis kebutuhan pada tahun berikutnya.

Terhadap ketidaksesuaian anggaran antara Renja Perubahan dan pagu anggaran yang diberikan, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru akan mengacu pada skala prioritas.

#### **1.2 Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Barru Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 harus memperhatikan dan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya sebagai acuan.
2. Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 digunakan sebagai dasar pelaksanaan Program Kerja Anggaran Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023.

#### **1.3 Rencana Tindak Lanjut**

Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Barru selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, Perubahan Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru. Perubahan Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Keuangan dan



Aset Daerah Kabupaten Barru sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Barru, 15 Agustus 2023

Kepala Badan Keuangan dan Aset  
Daerah Kabupaten Barru



**ABUBAKAR, S.Sos.M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. 19660816 198603 1 010